

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Riris Dian Hardiani

Jabatan

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi

Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Syarifah Liza Munira

Jabatan

: Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Riris Dian Hardiani

Syarifah Liza Munira

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI KESEHATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan	Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T-1)	2
		Annual utilization review untuk penyakit berbiaya tertinggi	20
		3. Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya	1
2.	Meningkatnya kebijakan pembiayaan, jaminan dan desentralisasi kesehatan berbasis bukti	Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75
		Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75
		3. Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	75
		4. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan	80
		5. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	50
3	Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	60
		Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN	12
		3. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account / District Health Account (PHA/DHA)	75
		4. Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif	75

		pelaksanaan Upaya Keseh Masyarakat (UKM) bersum APBD Murni	
		Persentase asuransi keseh swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	atan 75
		 Persentase kabupaten/kot melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah da swasta dalam penanganan penyakit prioritas 	an
		 Persentase kabupaten/kot melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah da swasta dalam upaya skrini penyakit 	an
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	I. Persentase Realisasi Angga BKPK	ran 95

Kegiatan	Ang	garan
1. Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	Rp	3.303.596.000
2. Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp	16.683.552.000
3. Dukman Pelaksanaan Program di BKPK	Rp	3.889.482.000
Total Anggaran Unit Kerja Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Rp	23.876.630.000

Jakarta, Desember 2023

Pihak Pertama

Syarifah Liza Munira

Pihak Kedua,

Riris Dian Hardiani